



Judul : Aplikasi: Tuntaskan RUU Administrasi Negara
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

PEMERINTAHAN

Apkasi: Tuntaskan RUU Administrasi Negara

JAKARTA (Suara Karya): Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengharapkan agar Rancangan Undang-undang Administrasi Negara dapat segera selesai. Ini mengingat banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi akibat kebijakan yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan keresahan bagi para bupati dan walikota di Indonesia yang akhirnya akan berimplikasi pada banyaknya penyelenggara pemerintahan yang mengambil "sifat pasif" dan kurang "responsif" terhadap pemenuhan kepentingan publik yang berkaitan dengan jabatannya.

"Mereka sering menjadi takut dan ragu dalam mengambil diskresi, kondisi seperti ini jika dibiarkan akan dapat menurunkan kreativitas, semangat inovasi, dan keberanian mengambil terobosan-terobosan demi kepentingan publik," kata Ketua Umum Apkasi Isran Noor, dalam rapat Dewan Apkasi yang juga membahas kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh para kepala daerah agar dalam mengambil keputusan tidak merugikan negara, di Jakarta, Rabu (19/6).

Rapat juga dihadiri para pengurus Apkasi, di antaranya Bupati Kuningan Aang

Suganda, Bupati Murung Raya Willy M Yoseph, dan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi.

Menurut Isran, diskresi merupakan keleluasaan kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan, inisiatif, serta inovasi atau terobosan atas sesuatu yang tidak tegas untuk kepentingan publik. Meski demikian, penggunaan kebijakan diskresi tersebut sangat rentan menyeret kepala daerah atau pejabat daerah kedalam tindak pidana penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

"Rendahnya kepastian dalam penegakan hukum sering membuat para penyelenggara pemerintah di daerah mengalami keresahan dan ketakutan untuk mengambil inisiatif dan diskresi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah," ujarnya.

Isran mengungkapkan, dari berbagai pemberitaan, dia melihat peningkatan jumlah kepala daerah yang terkait dan tersangkut permasalahan hukum karena kebijakan yang mereka lakukan. "Tidak lagi melihat apakah itu benar-benar merugikan negara atau tidak, tapi itu ternyata secara realita sudah masuk ke dalam daftar," ujarnya.

Karena itu, Isran, memin-

ta agar RUU Administrasi Negara cepat diselesaikan sehingga bisa membantu melindungi kebijakan-kebijakan yang diambil para kepala daerah dalam menjalankan otoritas sebagai pemimpin daerah dalam kebijakan otonomi daerah. "Karena itu, kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera men-sahkan RUU Administrasi Negara," ujar Isran Noor.

Sementara, Wakil Ketua Umum Apkasi Willy M Yoseph menyebutkan, hasil pembahasan rapat tersebut akan menjadi acuan dan masukan-masukan yang jelas dan terukur pada pemerintah dan DPR, agar undang-undang administrasi negara itu segera terselesaikan. "Kami para bupati dan wali kota siap untuk memberikan share dalam membahas undang-undang tersebut," katanya.

Menurut dia, para bupati dan kepala daerah tak pernah berniat merugikan negara, mereka terseret kasus karena tidak adanya panduan yang jelas soal pengelolaan keuangan daerah. "Mereka terjerat karena belum ada panduan yang jelas soal pengelolaan uang negara untuk pembangunan daerah. Ini beberapa kali kita sampaikan pada pemerintah pusat," ujarnya. (Kartoyo DS/Yudhiarna)